EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN STIMULAM PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KOTA BANDAR LAMPUNG Skripsi

Oleh

Dwi Kurniawan NPM 2111021103



PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG 2025

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Dwi Kurniawan

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2025

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Dwi Kurniawan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan fokus pada tiga dimensi efektivitas, yaitu input, proses, dan outcome. Sampel penelitian terdiri dari 67 kepala keluarga penerima BSPS tahun 2023. Hasil menunjukkan bahwa pada aspek input, dukungan dana dan material tergolong mencukupi, namun distribusi material masih sering mengalami keterlambatan akibat hambatan logistik. Dari aspek proses, program melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui prinsip gotong royong, meskipun pengawasan teknis dan pengelolaan waktu pelaksanaan belum optimal. Dari sisi outcome, terdapat peningkatan kualitas fisik rumah dan kondisi kesehatan penerima bantuan. Namun demikian, dampak terhadap aspek ekonomi belum terlihat signifikan, karena sebagian besar penerima belum mengalami peningkatan pendapatan atau produktivitas ekonomi. Oleh karena itu, program dinilai cukup efektif dalam aspek fisik dan sosial, namun perlu diperkuat dengan integrasi strategi pemberdayaan ekonomi agar manfaatnya lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas Program, BSPS, Dampak Ekonomi, Masyarakat Berpenghasilan Rendah

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF SELF-HELP HOUSING STIMULANT ASSISTANCE PROGRAM (BSPS) IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

Dwi Kurniawan

This study aims to analyze the effectiveness of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) in improving the social and economic conditions of low-income communities (MBR) in Bandar Lampung City. The method used is a descriptive quantitative approach with a focus on three dimensions of effectiveness, namely input, process, and outcome. The research sample consisted of 67 heads of families receiving BSPS in 2023. The results show that in terms of input, financial and material support are sufficient, but material distribution is still often delayed due to logistical obstacles. From the process aspect, the program involves active community participation through the principle of mutual cooperation, although technical supervision and management of implementation time are not optimal. From the outcome side, there is an increase in the physical quality of houses and the health conditions of aid recipients. However, the impact on the economic aspect has not been seen significantly, because most recipients have not experienced an increase in income or economic productivity. Therefore, the program is considered quite effective in terms of physical and social aspects, but it needs to be strengthened by integrating economic empowerment strategies so that the benefits are more sustainable.

Keyword: Program Effectiveness, BSPS, Economic Impact, Low-Income Communities

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi

: Efektivitas Program Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya

(BSPS) di Kota Bandar Lampung.

Nama Mahasiswa

: Dwi Kurniawan

Nomor Pokok Mahasisma

: 2111021103

Jurusan

: Ekonomi Pembangunan

Fakultas

: Ekonomi Dan Bisnis

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing 1

Komisi Pembimbing 2

Emi Maimunah, S.E., M.Si. NIP 198002182005012002 Resha Moniyana Putri, S.E., M.Si

NIP 198509142023212019

Elly

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Arivina Ratih Yulihar T., S.E., M.M. NIP 198007052006042002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Emi Maimunah, S.E., M.SI.

Duties

Penguji I : Dr. Ida Budiarty, S.E., M.Si.

day

Penguji II

: Resha Moniyana Putri, S.E., M.Si.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Juni 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa: Dwi Kurniawan

Nomor Pokok Mahasiswa: 2111021103

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya" telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman dan sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,

Dwi Kurniawan

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Dwi Kurniawan lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 20 Desember 2001. Penulis merupakan anak Kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sulaiman dan Ibu Eka Susilawaty. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2008 di SD Negeri 2 Way Halim Permai dan lulus pada tahun 2014 kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 29 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2017, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 12 Bandar Lampung jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan dinyatakan lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Jurusan Ekonomi Pembangunan melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP). Selama masa perkuliahan penulis aktif mengikuti organisasi diantaranya ROIS FEB Unila sebagai Kepala Divisi Research and Development BSO KSEI FoSEIL periode 2023. Selain itu penulis mengikuti kegiatan Magang di MSIB bagian Tenaga Fasilitator Lapangan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Tenaga Pendamping, kemudian penulis juga telah melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I tahun 2024 selama 40 hari di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

Penulis juga aktif mengikuti beberapa perlombaan dibidang Cipta Puisi dan mendapatkan prestasi hingga bisa menerbitkan buku yang diselenggarakan oleh Olimpiade Sastra Nasional.

MOTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(QS. Al-Baqarah: 286)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Al-Insyirah: 6)

Betapapun sulitnya hidup, selalu ada sesuatu yang bisa kamu lakukan dan berhasil..

(Stephen Hawking)

Keyakinan adalah pondasi, tapi tak cukup untuk meraih impian. Perlu usaha yang tekun dan doa yang tulus sebagai langkah terbaik menuju keberhasilan. Karena harapan tanpa tindakan hanyalah angan, dan tindakan tanpa doa adalah kesombongan.

(Dwi Kurniawan)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sulaiman dan Ibu Eka Susilawaty

Mak, Bah... tiada kata yang mampu sepenuhnya menggambarkan betapa besar cinta dan terima kasihku. Dalam setiap langkahku, doa kalian adalah cahaya yang menuntunku, dan pengorbanan kalian adalah alasan aku masih bertahan hingga hari ini. Kalian tidak pernah lelah mempercayai bahwa aku mampu, bahkan ketika aku sendiri mulai meragukannya. Terima kasih atas cinta yang tak pernah habis, atas pelukan yang selalu hangat, dan atas segala lelah yang tak pernah kalian keluhkan. Segala yang kujalani hari ini adalah bentuk kecil dari perjuangan besar yang telah kalian mulai sejak lama. Semoga kelak aku bisa membalas, meski takkan pernah sebanding.

Teruntuk Kakakku, Ratih Ningtias

Terima kasih adiku yang selalu memberikan dukungan dan doa karena kita berdua yang akan meneruskan perjuangan keluarga kita.

Serta,

Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmu, nasihat, dan pengetahuannya kepada saya selama menjalankan masa perkuliahan dan almamater tercinta.

SANWACANA

Segala puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi. Penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung di dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga membantu proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.
- 2. Ibu Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.
- 3. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Sc. Selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.
- 4. Bapak Arid Darmawan, S.E., M.A. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis selama masa perkuliahan.
- 5. Ibu Emi Maimunah, S.E., M.E. Selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah meluangkan waktu, masukan, arahan, serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 6. Ibu Resha Moniyana Putri, S.E., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah meluangkan waktu, masukan, arahan, serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Bapak Dr. Ida Budiarty, S.E., M.Si. Selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dan juga memberikan saran dan masukan, serta ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.

- 8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat selama masa perkuliahan dan Seluruh Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
- 9. Terimakasih Kepada Bang Elvi Sukendri, S.E., M.Si Selaku Admin Jurusan Yang Telah Membantu Dalam Mengurus Segala Keperluan Administrasi Selama Proses Kelulusan.
- 10. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sulaiman dan Ibu Eka Susilawaty terima kasih yang tiada henti memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral dan material, serta motivasi yang menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
- 11. Kakakku Yang Selalu Ku Kagumi, Ratih Ningtias. Terimakasih Atas Segala Support Baik Moral Maupun Material, Semoga Engkau Dan Keluarga Selalu Dalam Lindungan Dan Kasih Sayang Allah Swt.
- 12. Teruntuk kekasihku tercinta, Rahma Juliana, terima kasih telah setia mendampingiku, memberikan keyakinan, dan mendukung setiap Langkah kecil yang penulis Jalani. Doa dan dukunganmu selalu menjadi sumber kekuatan terbesar bagiku. Skripsi ini aku persembahkan juga untukmu, sebagai ungkapan terima kasih dan rasa saying penulis untukmu, I love you saying.
- 13. Sahabat-Sahabat Seperjuangan Dzikri, Yoga, Anggi, Wahyu, Maulana, Taufiq, Firman, Dan Yasidik Yang Telah Menemani Di Setiap Masa Suka Maupun Duka Mewarnai Hidupku Terutama Pada Masa Perkuliahan, Selalu Menjadi Tempat Bercerita Dan Selalu Memberikan Keceriaan Dan Dukungan Semangat Untuk Penulis.
- 14. Teman-Teman Bimbingan "Bu Emi" Anggi Anggriawan dan Gita Safitri Yang Telah Membersamai, Saling Memberikan Dukungan Dan Semangat Selama Berproses Dalam Penyelesaian Skripsi Ini.
- 15. Teman seperjuangan magang Faiz yang sudah membantu dan memberi dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
- 16. Teman-Teman Presidium Rois 2023 Yang Tidak Bisa Disebutkan Satu Persatu, Terimakasih Atas Kerjasamanya Selama Masa Kepengurusan.
- 17. Teman-Teman Bapereg Fossei Sumbagsel Periode 2024 Yang Tidak Bisa

Disebutkan Satu Persatu, Terimakasih Telah Memberikan Banyak Dukungan, Nasihat, Dan Wawasan Yang Sangat Bermanfaat Bagi Penulis Untuk Bisa Terus Mengembangkan Diri Dalam Berorganisasi.

18. Teman-teman Ekonomi Pembangunan Angkatan 2021 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama-sama di Ekonomi

Pembangunan dari awal perkuliahan hingga saat ini.

Bandar Lampung, 17 Juni 2025

Penulis

Dwi Kurniawan

DAFTAR ISI

	F	Halaman
DAF	TAR ISI	i
DAF	TAR TABEL	iv
DAF	TAR GAMBAR	V
DAF	TAR LAMPIRAN	vii
I.	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	2 Rumusan Masalah	10
1.3	3 Tujuan Penelitian	11
1.4	Manfaat Penelitian	11
II.	TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1	Ekonomi Pembangunan	13
2.2	Ekonomi Publik	13
2	2.2.1 Fungsi Ekonomi Publik Menurut Richard W. W. Tresch	13
2	2.2.2 Subsidi	14
2.3	8 Kemiskinan	15
2	2.3.1 Kemiskinan Menurut Todaro	15
2	2.3.2 Kemiskinan Absolut	15
2	2.3.3 Masyarakat Berpenghasilan Rendah	15
2.4	1 Efektivites	16

2.5	Rumah Layak Huni	
2.6	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	
2.7	Tinjauan Empiris	
2.8	Kerangka Pemikiran	
III.	METODE PENELITIAN24	
3.1	Ruang Lingkup Penelitian 24	
3.2	Jenis Penelitian 24	
3.	.2.1 Waktu dan Tempat Penelitian	
3.	.2.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian	
3.3	Variabel Penelitian	
3.4	Populasi dan Sampel	
3.5	Metode Pengumpulan Data	
3.6	Teknik Pengolahan Data	
3.7	Analisis Data	
3.7	Instrumen Penelitian	
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN40	
4.1	Gambaran Umum Daerah Penelitian	
4.	.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Bandar Lampung	
4.2	Kondisi Kesehatan Penerima Bantuan Sebelum dan Setelah Program	
BSF	PS di Kota Bandar Lampung	
4.3	Uji Signifikansi Instrumen Penelitian	
4.	.3.1 Uji Validitas Kuesioner	
4.	.3.2 Uji Reliabilitas Kuesioner	
4.4	Deskriptif Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	
(BS	PS) di Kota Bandar Lampung	
4.	.4.1 Capaian Efektifitas Variabel <i>Input</i>	

4.4	.2 Capaian Efektivitas Variabel <i>Process</i>	60
4.4	.3 Capaian Efektivitas Variabel <i>Outcome</i>	62
4.5	Pembahasan	64
V.	SIMPULAN DAN SARAN	73
5.1	Kesimpulan	73
5.2	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		76
LAMPIRAN		81

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman
1. Penelitian Terdahulu
2. Alokasi Penerima Bantuan BSPS di Kota Bandar Lampung Tahun 2023 25
3. Definisi Operasional Variabel
4. Populasi Alokasi Penerima Bantuan BSPS di Kota Bandar Lampung Tahun 2023
5. Sampel Penerima Bantuan BSPS Berdasarkan Desa/Kelurahan di Kota Bandar
Lampung Tahun 2023
6. Bentuk Skor Pada Penelitian
7. Kategori Efektifitas
8. Rancangan Analiisis deskriptif Kuantitatif Efektivitas Program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Bandar Lampung
9. Hasil Uji Validitas Responden
10. Kategori Reliabilitas
11. Hasil Uji Reliabilitas Responden
12. Aspek Variabel Input
13. Aspek Variabel Process
14. Aspek Variabel Outcome 62
15. Hasil Capaian Efektivitas

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman
Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2020-2023
Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 4
Gambar 3. Skor rata-rata livable city index kota-kota di Indonesia khususnya di
Sumatera tahun 2022
Gambar 4. Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bandar Lampung Tahun
20239
Gambar 5. Kerangka Berpikir
Gambar 6. Karakteristik Usia Responden
Gambar 7. Karakteristik Pendidikan Responden
Gambar 8. Karakteristik Jenis Kelamin Responden
Gambar 9. Karakteristik Jenis Pekerjaan
Gambar 10. Karakteristik Pendapatan Perbulan Responden
Gambar 11. Kontribusi Pengeluaraan Responden Penerima Bantuan Selama BSPS
46
Gambar 12. Kondisi Rumah Responden Penerima Bantuan BSPS di Kota Bandar
Lampung Berdasarkan Pencahayaan, Penghawaan, dan Fasilitas MCK Sebelum
dan Sesudah
Gambar 13. Kondisi Rumah Responden Penerima Bantuan BSPS di Kota Bandar
Lampung Berdasarkan Air PAM, Air Tanah, dan Air Sumur Sebelum dan Sesudah
Gambar 14. Kondisi Responden Penerima Bantuan BSPS di Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Frekuensi Mengalami Sakit Sebelum dan Sesudah
Gambar 15. Kondisi Rumah Responden Penerima Bantuan BSPS di Kota Bandar
Lampung Berdasarkan Bahan Atap Rumah Sebelum dan Sesudah

Gambar 16. Kondisi Rumah Responden Penerima Bantuan BSPS di Kota Ba	ındar
Lampung Berdasarkan Bahan Dinding Rumah Sebelum dan Sesudah	52
Gambar 17. Kondisi Rumah Responden Penerima Bantuan BSPS di Kota Ba	ındar
Lampung Berdasarkan Bahan Lantai Rumah Sebelum dan Sesudah	53
Gambar 18. Pra dan Paska Konstruksi Bangunan BSPS	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Formulir Izin Penelitian Kuesioner	82
2. Kuesioner Penelitian	83
3. Sebaran Sampel Penerima Bantuan	92
4. Karakteristik Responden Penerima Bantuan	99
5. Hasil Kuesioner Responden	102
6. Sumber Data	105
7. Uji Validitas Kuesioner	107
8. Uji Reliabilitas Kuesioner	112
9. Rancangan Analisis Deskriptif	115
10. Dokumentasi Penelitian	118
11 Before-After Rumah Penerima Bantuan Program BSPS	121

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena universal yang dialami oleh seluruh negara, meskipun dengan tingkat intensitas yang lebih tinggi pada negara berkembang (developing countries) dan negara terbelakang (least developed countries), dimana masalah ini menjadi tantangan struktural utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia yang hingga kini terus berupaya melalui berbagai kebijakan intervensi untuk mengatasinya secara komprehensif. Secara konseptual, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi deprivasi ekonomi dimana individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup (basic needs), dengan indikator kuantitatif berupa pengeluaran per kapita bulanan yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line), sehingga menciptakan keterbatasan akses terhadap sumber daya esensial dan berpotensi menjerumuskan masyarakat ke dalam siklus kemiskinan (cycle of poverty) yang bersifat multidimensi (Nahdah et al., 2023).

Berdasarkan berbagai definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh para ahli, salah satu indikator utama untuk mengidentifikasi kemiskinan adalah tingkat pendapatan. Bank Dunia mendefinisikan masyarakat miskin yang memiliki pendapatan per kapita sebesar USD 1,9 per hari. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menetapkan batas kemiskinan pada pendapatan per kapita sebesar Rp361.990,00 per bulan atau setara dengan Rp12.066 per hari. Rendahnya tingkat pendapatan tersebut berimplikasi pada terbatasnya akses masyarakat terhadap perumahan yang layak (Gilbert, 2014). Rumah tidak sekadar merupakan struktur fisik. melainkan mencakup dimensi juga biologis, psikologis, dan sosial.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Bab I

Pasal 1 nomor 7, rumah didefinisikan sebagai bangunan gedung yang berperan sebagai tempat tinggal layak huni, sarana pembinaan keluarga, representasi harkat dan martabat penghuni, sekaligus sebagai aset bernilai bagi pemiliknya. Definisi ini menegaskan bahwa rumah memiliki peran kompleks yang melampaui fungsi dasar sebagai tempat berlindung (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, 2011).

Keterbatasan pendapatan yang menghambat akses terhadap perumahan yang layak turut berperan dalam tingginya jumlah rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Isu kemiskinan ini terus berkembang di Indonesia dan semakin memperburuk ketimpangan kualitas hunian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maharani et al. (2024)mengenai fenomena kemiskinan yang terus berlangsung di Indonesia telah menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap perumahan yang memenuhi standar kelayakan. Data empiris dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2023 mengungkap fakta yang memprihatinkan, di mana 36,85% rumah tangga Indonesia atau setara dengan 26,92 juta rumah tangga terpaksa menghuni permukiman yang tidak memenuhi kriteria layak huni. Temuan ini secara tegas mengindikasikan adanya korelasi signifikan antara tingkat kemiskinan dengan keterbatasan akses terhadap hunian yang memadai. Berikut adalah data jumlah presentase penduduk miskin di Indonesia berdasarkan BPS:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) data Diolah, 2025

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2020-2023

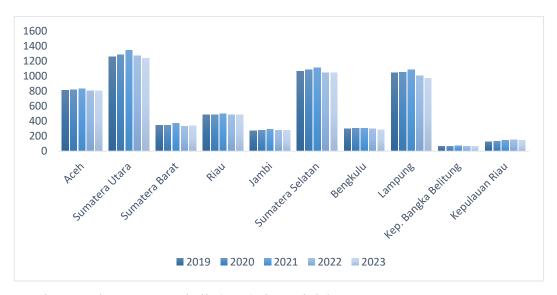
Fenomena ini sejalan dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan penurunan jumlah penduduk kelas menengah dari 57,33 juta orang pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta orang pada tahun 2024. Dengan demikian, terdapat sekitar 9,48 juta orang yang mengalami mobilitas ekonomi ke kategori yang lebih rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun angka kemiskinan secara umum menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, terdapat dinamika ekonomi yang mencerminkan meningkatnya kerentanan masyarakat dalam mempertahankan tingkat kesejahteraan dan daya beli mereka (Putri, 2024).

Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan sidang yang menghasilkan keputusan untuk melanjutkan skema MDGs dengan mengadopsi Sustainable Development Goals (SDGs). Inisiatif ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, mewujudkan kesetaraan, serta mengatasi perubahan iklim hingga tahun 2030. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 sasaran yang mencakup berbagai aspek pembangunan berkelanjutan. Upaya pengentasan kemiskinan dan implementasi MDGs telah banyak dilakukan, baik di tingkat global maupun nasional. Dalam hal ini, penghapusan kemiskinan (No Poverty) dan pengurangan ketimpangan (Reducing Inequality) tetap menjadi prioritas utama dalam agenda SDGs (Asadullah et al., 2018).

Menurut situs resmi Bappenas, penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2030 merupakan salah satu target dalam agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development). Berdasarkan proyeksi baseline (business as usual), tingkat kemiskinan diperkirakan masih berada pada angka 6,61% di tahun 2030, sedangkan dengan skenario intervensi, angka tersebut dapat ditekan hingga mencapai 3,38%. Untuk merealisasikan target tersebut, diperlukan percepatan program pengentasan kemiskinan guna menekan angka kemiskinan secara lebih efektif. Selain itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, ditetapkan target penurunan persentase kemiskinan menjadi 6%–7% pada tahun 2024. Namun, data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hingga Juni 2023, persentase penduduk miskin di

Indonesia masih berada di angka 9,36%. Angka ini masih cukup jauh dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2019-2024 maupun dalam agenda pembangunan berkelanjutan (Januarsyah, 2024).

Peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan hunian yang semakin mendesak tidak hanya berdampak pada tingkat nasional, tetapi juga terasa di berbagai wilayah, termasuk Pulau Sumatera. Dalam konteks ini, permasalahan kemiskinan di Sumatera menjadi semakin kompleks, terutama dengan adanya disparitas antarprovinsi dalam hal tingkat kesejahteraan dan akses terhadap perumahan layak. Kemiskinan di Pulau Sumatera merupakan isu yang kompleks. Data menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Sumatera mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin dengan rata-rata di atas 20%, kecuali untuk Aceh, Jambi, dan Sumatera Selatan yang mencatat penurunan. Tingkat kemiskinan di pulau ini umumnya melebihi standar nasional sebesar 9,36% pada tahun 2023, yang mengindikasikan bahwa tantangan ini masih belum teratasi (Rahmawati et al., 2024). Berikut adalah data jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera berdasarkan BPS:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) data Diolah, 2025

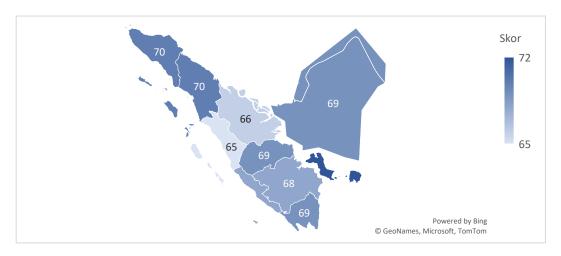
Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023

Dalam konteks kemiskinan di Pulau Sumatera, terdapat perbedaan yang mencolok antaraprovinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dan jumlah

penduduk miskin yang rendah, serta provinsi yang meskipun mengalami pertumbuhan tinggi, tetap menghadapi tantangan kemiskinan. Provinsi Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau adalah contoh provinsi yang menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan jumlah penduduk miskin yang relatif rendah. Di sisi lain, provinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi tetap menghadapi jumlah penduduk miskin yang signifikan. Meskipun Sumatera Utara menunjukkan pertumbuhan dengan jumlah penduduk miskin yang meningkat dari 1.260,5 ribu pada 2019 menjadi 1.343,86 ribu pada 2021, provinsi ini masih memiliki tantangan besar dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Begitu juga dengan Sumatera Selatan, yang mencatat jumlah penduduk miskin 1.067,16 ribu pada 2019 dan hanya sedikit menurun menjadi 1.045,68 ribu pada 2023. Sementara itu, Lampung menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin dari 1.041,48 ribu pada 2019 menjadi 970,67 ribu pada 2023, tetapi tetap menghadapi tantangan dalam mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi di banyak provinsi, jelas bahwa tantangan ini memerlukan perhatian dan upaya yang lebih besar untuk diatasi, terutama dalam hal distribusi pendapatan dan akses terhadap layanan dasar yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Barika et al., 2024).

Most Liveable City Index (MLCI) adalah studi yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) pada tahun 2022 untuk menilai kelayakan huni di 52 kota di 32 provinsi berdasarkan 28 kriteria. Studi ini kembali meluncurkan Indeks Kota Layak Huni di Indonesia. Sebagai titik transit strategis antara Pulau Sumatera dan Jawa, Bandar Lampung juga berperan sebagai pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan budaya. Bandar Lampung menjadi salah satu kota yang disurvei dalam penelitian ini. Hasil survei MLCI pada tahun 2017 dan 2022 menunjukkan peningkatan indeks kelayakan huni di kota ini. Pada tahun 2017, Bandar Lampung dikategorikan sebagai "kota tingkat bawah," menempati peringkat ke-24 dari 26 kota dengan skor 56,4, yang berada di bawah rata-rata. Namun, pada tahun 2022, kota ini mengalami kemajuan signifikan dengan peningkatan skor indeks menjadi 69, sehingga direklasifikasi sebagai "kota tingkat

rata-rata" dan menempati peringkat ke-18 dari 52 kota. Untuk mencapai status "kota papan atas" atau kota yang sangat layak huni, Bandar Lampung perlu meningkatkan skor indeks livabilitasnya ke kisaran 70-77 (Perdamaian et al., 2024). Berikut adalah klasifikasi tingkat kelayakan hunian kota-kota di Indonesia berdasarkan *Most Liveable City Index* (MLCI) oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) 2022, yang menilai 52 kota di 32 provinsi dengan 28 kriteria:



Sumber: Indonesia Most Livable City Index (MLCI) data diolah, 2025 Gambar 3. Skor rata-rata livable city index kota-kota di Indonesia khususnya di Sumatera tahun 2022

Menghadapi tantangan tersebut, Indonesia perlu mencari solusi untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kategori berpenghasilan rendah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meluncurkan program perumahan yang bertujuan untuk mengatasi masalah rumah tidak layak huni, yang semakin memburuk seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meluncurkan program pembangunan perumahan yang dikenal sebagai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelayakan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Desyra et al., 2021). Sehingga Pemerintah Kota Bandar Lampung berkewajiban untuk memastikan tersedianya perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan sehat, yang merupakan salah satu indikator pencapaian kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2017 tentang

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Selain itu, pemerintah daerah juga diwajibkan untuk menyediakan perumahan dan permukiman yang baik dan sehat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2017).

Sehubungan dengan Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, serta menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk hak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah (MBR). Penyediaan hunian yang layak dan lingkungan yang sehat merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang harus dijamin aksesnya bagi seluruh lapisan Masyarakat (Ihwan et al., 2022).

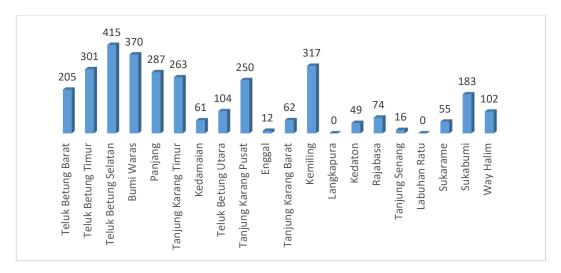
Pemerintah memilih Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai upaya untuk mengatasi masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) karena program ini mengedepankan prinsip keswadayaan masyarakat. Melalui BSPS, Masyarakat Berpenghasilan Rendah tidak hanya menerima bantuan berupa stimulus, tetapi juga diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam proses perbaikan rumah mereka. Keunggulan utama dari program ini terletak pada fleksibilitasnya, yang memungkinkan penyesuaian terhadap berbagai kebutuhan penerima bantuan, seperti kondisi fisik bangunan, kemampuan ekonomi, serta pemenuhan standar rumah layak huni yang mencakup aspek keselamatan, kecukupan ruang, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi. Selain itu, penerapan pendekatan gotong royong dalam BSPS turut mendukung pemberdayaan tenaga kerja lokal dan penguatan peran masyarakat sekitar, yang pada gilirannya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial-ekonomi mereka. Di Kota Bandar Lampung, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) tersebar di berbagai kecamatan dengan total keseluruhan mencapai 1.115 unit, sehingga memungkinkan

distribusi bantuan yang lebih terarah dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Program BSPS (Puspitasari et al., 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji implikasi sosial dan ekonomi dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), antara lain: (1) Qomaria (2015) Kebijakan dan Manajemen Publik Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto; (2) Khairunnisa & Nasruddin (2019) *The Role Of BSPS To Economic And Social Assistance Recipients in Simpang Empat District*; (3) Maiqfirlana et al., (2023) Dampak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penerima Bantuan (Studi Kasus Ds. Padi Kec. Tulakan Kab. Pacitan).

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat diidentifikasi adanya kesamaan temuan mengenai efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam memberikan dampak sosial dan ekonomi. Namun demikian, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi program BSPS di wilayah Kota Bandar Lampung, sehingga menciptakan suatu celah penelitian (*research gap*) yang perlu untuk dieksplorasi lebih lanjut.

Dalam upaya memenuhi hak atas hunian layak, sejumlah kecamatan di Kota Bandar Lampung menjalankan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2023, berdasarkan hasil verifikasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) yang kemudian ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR, 2022). Program ini bertujuan mengatasi permasalahan perumahan di Provinsi Lampung, yang masih menghadapi tantangan tingginya jumlah rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), banyak hunian di provinsi ini belum memenuhi tiga komponen utama Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak (Badan Pusat Statistik, 2023). Data berikut menunjukkan jumlah unit rumah tidak layak huni di Kota Bandar Lampung pada tahun 2023.



Sumber: Perkim (data diolah), 2023

Gambar 4. Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bandar Lampung Tahun 2023

Berdasarkan gambar 1.4 Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Bandar Lampung tersebar di berbagai kecamatan dengan total keseluruhan mencapai 1.115 unit. Kecamatan dengan jumlah RTLH tertinggi adalah Teluk Betung Selatan yang mencatat 415 unit, diikuti oleh Bumi Waras dengan 370 unit, dan Kemiling dengan 317 unit. Kecamatan lainnya seperti Teluk Betung Timur (301 unit), Panjang (287 unit), dan Tanjung Karang Timur (263 unit) juga menunjukkan angka yang signifikan. Sementara itu, kecamatan seperti Teluk Betung Utara (104 unit), Way Halim (102 unit), dan Rajabasa (74 unit) mencatat jumlah sedang. Di sisi lain, beberapa kecamatan memiliki jumlah RTLH yang relatif rendah, seperti Sukarame (55 unit), Kedaton (49 unit), Tanjung Senang (16 unit), dan Enggal (12 unit). Bahkan, ada dua kecamatan, yaitu Langkapura dan Labuhan Ratu, yang tidak memiliki rumah tidak layak huni sama sekali. Data ini menunjukkan bahwa distribusi RTLH di Bandar Lampung bervariasi, dengan konsentrasi yang lebih tinggi di wilayah Teluk Betung dan kecamatan-kecamatan tertentu lainnya. Oleh karena itu, program perbaikan rumah tinggal layak huni perlu difokuskan pada kecamatan dengan jumlah RTLH yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diharapkan memberikan manfaat signifikan bagi penerima bantuan dengan mewujudkan hunian yang layak, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kemandirian penerima bantuan dan masyarakat sekitar dalam memperoleh tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas program BSPS menjadi aspek penting dalam mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya (Zahira et al., 2024). Program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, menurut Robiansyah et al. (2022) Program ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu membeli rumah layak. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala seperti status lahan, akses jalan yang sulit bagi kendaraan pengangkut material, resistensi masyarakat, serta tumpang tindih dengan program lain. Meski demikian, penerima manfaat merasakan dampak positifnya secara langsung, karena dana yang diterima segera digunakan untuk pembelian bahan bangunan tanpa hambatan pendanaan.

Program BSPS turut berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang, menunjukkan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat penerima manfaat, menurut Viyulia et al. (2023). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program BSPS di Kota Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Bandar Lampung ditinjau dari aspek input, proses, dan outcome?
- 2. Bagaimana pengaruh faktor pendukung dan penghambat terhadap efektivitas pelaksanaan Program BSPS serta dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi penerima manfaat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah sebelumnya di atas, maka penelitian ini memiliki sejumlah tujuan seperti:

- Untuk menganalisis tingkat efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Bandar Lampung berdasarkan indikator input, proses, dan outcome.
- Untuk mengidentifikasi pengaruh faktor pendukung dan penghambat terhadap efektivitas Program BSPS serta mengevaluasi dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi penerima manfaat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya penerima Program BSPS, mengenai efektivitas program tersebut dalam meningkatkan kualitas hidup, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat yang belum menerima bantuan, sebagai pertimbangan dalam mengikuti program sejenis di masa depan.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna bagi pemerintah, khususnya instansi pelaksana Program BSPS, dalam mengevaluasi efektivitas dan kendala pelaksanaan program di lapangan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai efektivitas program bantuan sosial, khususnya di bidang perumahan swadaya. Bagi peneliti, penelitian ini juga memberikan pengalaman empiris dalam menganalisis kebijakan publik berbasis data di lapangan. Selain itu, penelitian ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ekonomi Pembangunan

Lincolin Arsyad, seorang pakar ekonomi pembangunan dari Indonesia, menjelaskan bahwa ekonomi pembangunan merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas berbagai permasalahan ekonomi di negara berkembang serta kebijakan-kebijakan yang harus ditempuh guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi (Fatimahtuzzahro, 2022).

2.2 Ekonomi Publik

Musgrave (1959) menjelaskan dalam bukunya *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy* bahwa ekonomi publik membahas mengenai bagaimana pemerintah mengelola anggaran negara melalui kebijakan pajak dan pengeluaran publik, dengan tujuan utama untuk mencapai efisiensi alokasi sumber daya dan keadilan distribusi pendapatan dalam perekonomian

2.2.1 Fungsi Ekonomi Publik Menurut Richard W. W. Tresch

Tresch (2002) dalam bukunya *Public Finance: A Normative Theory* menjelaskan bahwa tujuan utama dari intervensi fiskal melalui program subsidi publik adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial secara optimal. Terdapat tiga prinsip utama yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan subsidi:

1. Redistribution

Menekankan pentingnya upaya negara dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan secara langsung. Bantuan fiskal harus mampu mendorong akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar.

2. Minimization of Excess Burden

Tresch juga menjelaskan bahwa program subsidi harus dirancang tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat, baik dalam bentuk distorsi ekonomi, ketergantungan, maupun beban administratif yang berat. Dalam kerangka normatifnya, subsidi yang baik adalah subsidi yang efisien secara sosial, yakni tidak menghasilkan *excess burden* atau biaya efisiensi yang lebih besar daripada manfaat yang diberikan

3. Incentive Compatibility

Tresch menyoroti pentingnya insentif positif dari program publik. Artinya, program subsidi seharusnya tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, melainkan juga mendorong produktivitas, seperti membuka usaha baru, meningkatkan partisipasi pendidikan anak, atau memperbaiki kapasitas kerja penerima bantuan. Dengan demikian, subsidi dapat menjadi alat pemberdayaan yang berkelanjutan, bukan sekadar penyangga sesaat

2.2.2 Subsidi

Dalam teori ekonomi publik, subsidi merupakan bentuk campur tangan pemerintah melalui pemberian bantuan dana kepada produsen atau konsumen, dengan tujuan menurunkan harga barang atau jasa agar dapat mencapai sasaran sosial dan ekonomi tertentu (Stiglitz et al., 2015). Subsidi dimaksudkan untuk mengatasi kegagalan pasar, meningkatkan akses ke layanan penting, dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada seberapa akurat subsidi tersebut ditargetkan dan seberapa efektif subsidi tersebut didistribusikan. Subsidi dianggap efisien jika manfaat sosial yang diciptakannya lebih besar daripada pengeluaran pemerintah. Sebaliknya, subsidi menjadi tidak efisien jika sebagian besar manfaatnya diberikan kepada kelompok yang bukan sasaran, seperti rumah tangga kaya, yang menyebabkan pemborosan dana publik dan ketidakseimbangan pasar (Musgrave et al., 1989).

2.3 Kemiskinan

Menurut Meidiana (2019) dalam (Wijayanto, 2021) Kemiskinan terjadi ketika sebuah rumah tangga atau individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara memadai. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya sosial, aset, keuangan, organisasi sosiopolitik, barang dan jasa, pengetahuan, keterampilan, serta sumber informasi.

2.3.1 Kemiskinan Menurut Todaro

Menurut (Todaro et al., 2006), kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan dasar untuk hidup secara layak. Kondisi ini mencerminkan ketidakmampuan dalam memenuhi keperluan pokok seperti sandang, pangan, papan, serta keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.

2.3.2 Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Absolut menurut Ragnar Nurkse dalam (Kuncoro, 2009) Dimana masyarakat dikategorikan berada dalam kondisi kemiskinan absolut apabila individu memiliki tingkat pendapatan yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini mengakibatkan individu tersebut mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dalam konteks kemiskinan absolut, pendapatan dijadikan indikator utama untuk mengukur apakah seseorang mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, serta tempat tinggal yang layak demi menjalani kehidupan yang lebih baik, .

2.3.3 Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) No. 5/Permen/M/2007, masyarakat yang memiliki pendapatan bulanan di bawah Rp2.500.000 diklasifikasikan sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sedangkan menurut Program Nasional Pengembangan Sejuta Rumah tahun 2004,

batas penghasilan untuk dikategorikan sebagai MBR adalah sebesar Rp1.500.000 per bulan. Selain itu, menurut Karamoy dalam Budiarjo (1998) mengemukakan bahwa individu yang memperoleh penghasilan antara Rp10.000 hingga Rp30.000 per bulan juga termasuk dalam kelompok MBR. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang memperoleh penghasilan di bawah Rp2,5 juta per bulan tergolong sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (Indrianingrum, 2016).

2.4 Efektivitas

Menurut (Wayne K. Hoy, 2008), efektivitas dapat diukur melalui sejumlah indikator dengan menggunakan contoh objek program berupa lembaga pendidikan, yakni sekolah. Indikator-indikator tersebut dijelaskan melalui tiga aspek utama, yaitu masukan (*input*), proses (*process*), dan hasil (*outcome*) seperti berikut:

1. Input (Masukan)

Merupakan segala sumber daya awal yang diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan suatu program secara efektif.

2. Proces (Proses)

Menggambarkan pelaksanaan kegiatan dalam program secara sistematis berdasarkan input yang tersedia.

3. Outcome (Hasil)

Merupakan hasil akhir yang dicapai dari suatu program sebagai indikator keberhasilan secara menyeluruh.

2.5 Rumah Layak Huni

Berdasarkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan ke-11 tentang "*Sustainable Cities and Communities*", terdapat empat indikator utama yang menjadi parameter penilaian rumah layak huni dalam rangka penanganan permukiman kumuh. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan Bangunan (*Durable Housing*), Indikator ini mengacu pada kualitas material konstruksi yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu :

- a. Komponen atap harus menggunakan material genteng, kayu/sirap, atau seng
- b. Komponen dinding harus berupa tembok/GRC board, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, atau batang kayu
- c. Komponen lantai harus terbuat dari marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, kayu/papan, atau semen/bata merah
- 2. Kecukupan Luas Ruang (*Sufficient Living Space*), Standar minimum yang ditetapkan adalah 7,2 m² per kapita dengan perhitungan kumulatif untuk seluruh penghuni. Contoh perhitungan: untuk rumah dengan 5 penghuni memerlukan luas minimal 36 m² (5 x 7,2 m²).
- 3. Akses Air Minum Layak (*Access to Improved Water*), Kriteria ini mencakup dua aspek :
 - a. Sumber air harus berasal dari: Leding meteran/eceran, Hidran umum, Penampungan air hujan, Sumur bor/pompa terlindung, dan Mata air terlindung
 - b. Kualitas air harus memenuhi parameter ; tidak berasa, berbau, atau berwarna, Ketersediaan minimal 12 jam/hari, Aksesibilitas jarak jangkau ≤30 menit, Kimia-biologi bebas mikroorganisme patogen dan logam berat
- 4. Akses Sanitasi Layak (*Access to Adequate Sanitation*), Sistem sanitasi harus memenuhi standar (Permenkes No. 3 Tahun 2014): Menggunakan kloset leher angsa, Dilengkapi septic tank atau SPAL, Khusus daerah pedesaan diperbolehkan menggunakan lubang tanah.

Selain empat kriteria utama, rumah layak huni wajib memenuhi standar kesehatan berupa ventilasi alami minimal 5% luas lantai untuk sirkulasi udara optimal, dan bukaan pencahayaan alami minimal 10% luas lantai untuk intensitas cahaya memadai (Kementerian PUPR, 2022).

2.6 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, program BSPS memberikan bantuan berupa alokasi

dana tunai sebesar Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja, dengan total bantuan senilai Rp20 juta per penerima yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tanpa dikenakan biaya administrasi apapun, dimana dana tersebut berfungsi sebagai stimulan bagi masyarakat dalam membangun atau memperbaiki rumah secara swadaya dengan prinsip gotong royong (Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, 2018).

Menurut Surat Edaran Dirjen Perumahan No.14/2022 dalam Aini et al. (2024) tentang Juknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya, syarat penerima bantuan BSPS adalah sebagai berikut:

- 1. WNI yang sudah berkeluarga.
- 2. Memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan yang jelas dan sah atau bukti penguasaan atau izin tinggal minimal 10 tahun ke depan.
- Memiliki dan menempati rumah satu-satunya dalam kondisi tidak layak minimal 3 tahun.
- 4. Belum pernah memperolah bantuan rumah swadaya dalam jangka waktu 10 tahun
- Memiliki penghasilan keluarga dengan batas paling tinggi sebanyak setengah kali UMP/UMK.
- 6. Bersedia mengikuti ketentuan program, yakni :
 - a. Berswadaya bagi yang mampu.
 - b. Membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB).
 - c. Mengikuti pembinaan ekonomi dan sosial.

2.7 Tinjauan Empiris

Peneliti telah mengkaji beberapa jurnal terkait yang memiliki kajian serupa sebelum melakukan penelitian. Berikut adalah daftar kajian peneliti:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul,	Variabel	Metode	Hasil
•	Penulis, Tahun			
1	2	3	4	5
1.	Housing Assistance, Poverty, and Material Hardships, Julie Cai (2022)	Reception of Housing Assistance, Rent- Stabilized Tenants, Rent Burden, Residential Crowding, Housing Insecurity, Income Poverty, Material Hardships, Controls	Data Panel Model Resgresi Logistik Regresi OLS	Penelitian ini menunjukkan bahwa Individu yang tetap tinggal di perumahan bersubsidi memiliki risiko lebih rendah mengalami beban sewa berlebih, tunawisma, atau lingkungan padat, serta lebih kecil kemungkinannya jatuh ke dalam kemiskinan dibandingkan mereka yang tidak lagi menerima bantuan. Namun, perumahan bersubsidi tidak berdampak signifikan pada kesulitan ekonomi, dan tidak ada hubungan antara regulasi sewa dengan kondisi ekonomi atau perumahan rumah tangga berpenghasilan rendah.
2.	The Effect of Targeted Subsidies on Poverty Exposure of Housing Voucher Recipients: Evidence from the Small-Area Fair Market Rents, Michael D. Eriksen, Eunjee Kwon, Guoyang Yang, (2023)	Variabel Dependen (X): household head-level control variables, such as race, gender, and age of household head, if have any children or disabled members, and the	Data Panel:2005-2021 Model voltage effect Regresi two-stage least squares (2SLS) (Regresi kuadrat terkecil dua tahap)	Penelitian ini menganalisis tingkat kemiskinan di area sensus sekitar rumah tangga penerima bantuan, yang mencerminkan apakah mereka tinggal di wilayah berpenghasilan rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SAFMR secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan di kalangan penerima, terutama karena perubahan preferensi perumahan dan dinamika hubungan antara tuan tanah dan penyewa. Tren ini tampaknya

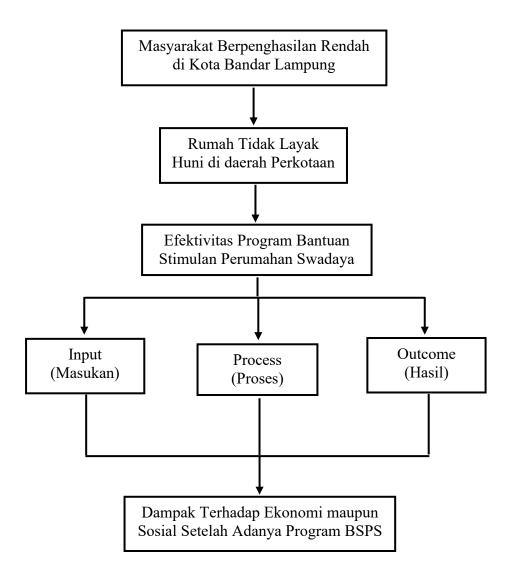
No ·	Judul, Penulis, Tahun	Variabel	Metode	Hasil
1	2	3	4	5
3.	Effect of Effectiveness	number of household members. Variabel Independen (Y): poverty rates of the household's census Variabel Dependen (X):	Cross Sectional: 2019	dipengaruhi oleh penempatan awal penerima voucher baru, yang mengindikasikan bahwa biaya pemindahan menjadi hambatan besar bagi pemegang voucher lama dalam memanfaatkan kebijakan ini secara efektif. Dari penelitian berikut dapat disimpulkan bahwa variabel efektivitas program Bantuan
	of The Self - Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) on Poverty Alleviation, Indayani B, Sitti Sadriah (2020)	Program BSPS Variabel Independen (Y): Pengentasan Kemiskinan	Deskriptif Kuantitatif Regresi OLS (Ordinary Least Squares)	Stimulan Perumahan (BSPS) berpengaruh langsung sebesar 11,5% terhadap variabel pengentasan kemiskinan. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa efektivitas program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan.
4.	Pengaruh Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Zilfa Mundok, Tri Oldy Rotinsulu,	Variabel Dependen (X): Bantuan Pembangun an Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH), Variabel Independen (Y): Kesejahtera n Masyarakat	Cross Sectional: 2021 Deskriptif Kuantitatif: Regresi OLS (Ordinary Least Squares)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program RTLH belum sepenuhnya berhasil atau berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil pengujian statistik, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,008, yang lebih kecil dari tingkat probabilitas 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel pembangunan RTLH (X) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat (Y).

No	Judul,	Variabel	Metode	Hasil
•	Penulis,	, mimoei	1/10/040	114511
	Tahun			
1	2	3	4	5
	Irawaty Masloman (2022)			
5.	Effect of Housing Support Programs on Residential Satisfaction and the Housing Cost Burden: Analysis of the Effect of Housing Support Programs in Korea Based on Household Attributes, Saehim Kim ,Joonwon HwangMyeon g-Hun Lee (2022)	Variabel Dependen (X): Residential satisfaction, Housing cost burden Variabel Independen (Y): Monthly rental house	Cross- Sectional: 2020 Multiple Regressio n, Ordinal Logistic Regressio n (OLR)	Hasil dari penelitian berikut menguraikan mengenai Tinggal di rumah sewa milik pemerintah memiliki dampak positif terhadap tingkat kepuasan hunian bagi seluruh kategori rumah tangga, termasuk rumah tangga individu dan lansia. Kondisi ini membantu mengurangi beban biaya perumahan bagi semua kelompok rumah tangga.
6.	Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kec. Tamalanrea Kota Makassar, Hardayanti Ayu Amalya, Rudi Latief, Nasrullah (2020)	Variabel Dependen (X): X1 (Masukan/I nput), X2 (Procces/Pr oses), X3 (Hasil Jangka Pendek/Out put) Variabel Independen (Y): Hasil Jangka	Cross Sectional: 2020 Kuantitatif	Tingkat efektivitas Program BSPS di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dikategorikan sebagai sangat efektif. Namun, terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaannya, seperti keterbatasan dukungan tenaga pendamping, kondisi cuaca dan iklim, serta faktor lainnya.

No ·	Judul, Penulis, Tahun	Variabel	Metode	Hasil
1	2	3	4	5
		Panjang/Out		
		come		

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis untuk penelitian ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandar Lampung melalui akses hunian yang layak. Berdasarkan latar belakang dan refleksi teoritis sebelumnya, program Bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) dapat dijelaskan seperti yang terlihat pada Gambar 2.2 sebagai berikut :



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025

Gambar 5. Kerangka Berpikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup berbagai aspek terkait pelaksanaan program BSPS di Kota Bandar Lampung. Penelitian dilakukan di beberapa kecamatan yang menjadi lokasi penerapan program, dengan responden terdiri dari masyarakat penerima bantuan BSPS tahun 2023. Fokus utama penelitian adalah jenis bantuan yang diberikan, seperti material bangunan dan dukungan teknis, serta dampaknya terhadap rumah tidak layak huni sebelum dan sesudah intervensi. Selain itu, penelitian menilai kualitas bahan bangunan, proses pembangunan, dan pengaruh program terhadap kondisi sosial ekonomi penerima, termasuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Data dikumpulkan melalui kuesioner untuk memperoleh informasi kuantitatif tentang persepsi responden terhadap efektivitas program, serta wawancara untuk menggali pengalaman mereka secara kualitatif. Observasi juga dilakukan untuk menilai perubahan kondisi fisik rumah. Analisis data mencakup penghitungan frekuensi dan persentase untuk menggambarkan karakteristik responden, serta hubungan antara program BSPS dan pengurangan rumah tidak layak huni (Rahman et al., 2022).

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam meningkatkan kualitas hunian di Kota Bandar Lampung. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif analisis dilakukan melalui proses pengumpulan data,

pengolahan, dan penyajian hasil yang disertai interpretasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program. Sementara itu, penelitian ini digunakan untuk mengukur sejauh mana program BSPS telah berjalan efektif berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan (Rahman et al., 2022).

3.2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini mencakup berbagai aspek terkait implementasi Program BSPS di Kota Bandar Lampung. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kemiling, Teluk Betung Barat, Bumi Waras, Panjang, dan Enggal sebagai wilayah sasaran program, dengan responden terdiri dari penerima manfaat BSPS tahun 2023. Adapun penelitian ini dilakukan pada tahun 2025. Berikut adalah data jumlah alokasi 5 kecamatan penerima bantuan program BSPS pada tahun 2023 :

Tabel 2. Alokasi Penerima Bantuan BSPS di Kota Bandar Lampung Tahun 2023

No.	Kecamatan	
1.	Bumi Waras	
2.	Enggal	
3.	Kemiling	
4.	Panjang	
5.	Teluk Betung Barat	
Total	5	

Sumber: SNVT Penyedia Perumahan, 2025

3.2.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sebelum menentukan metode yang tepat untuk mengumpulkan data, peneliti perlu memahami terlebih dahulu jenis data yang berkaitan dengan teknik pengumpulan yang digunakan. Metode pengumpulan data memiliki karakteristik tersendiri yang menghasilkan tipe data berbeda, penting agar peneliti dapat memilih alat analisis yang sesuai dengan data yang diperoleh (Rahman et al., 2022):

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari

sumber aslinya melalui metode seperti wawancara, survei, atau eksperimen. Data ini dikumpulkan langsung dari pihak pertama dan umumnya dianggap sebagai bentuk data yang paling akurat dalam penelitian. Pemilihan sumber data primer biasanya dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan atau tujuan khusus dari suatu penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia sebelumnya dan dikumpulkan oleh peneliti lain, yang kemudian dapat dimanfaatkan dalam penelitian selanjutnya. Dengan kata lain, data sekunder adalah data historis yang dihimpun di waktu lampau. Sering kali, data ini awalnya dikumpulkan untuk tujuan penelitian tertentu, lalu dibagikan agar dapat digunakan kembali oleh peneliti lainnya.

3.3 Variabel Penelitian

Objek yang diamati dalam sebuah penelitian disebut sebagai variabel penelitian. Variabel penelitian merujuk pada elemen yang telah diidentifikasi oleh peneliti sebagai fokus kajian, yang selanjutnya diukur dan dianalisis untuk memperoleh data yang relevan guna mendukung proses penarikan Kesimpulan (Mulyani et al., 2021) Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, berikut disajikan definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Satuan	Skala
		Pengukur	
1	2	3	4
Input	1. Calon Penerima bantuan BSPS	Likert	Ordinal
(Masukan)	menunjukkan kemampuan swadaya		
	melalui kontribusi dana pribadi atau		
	penyediaan bahan bangunan, serta		
	memahami pentingnya pemberdayaan		
	untuk memperbaiki kondisi rumah		
	secara mandiri.		
	2. Calon penerima bantuan menilai bahwa		
	nilai bantuan Rp20 juta yang terdiri dari		
	material dan upah tukang sudah sudah		

Variabel	Indikator	Satuan	Skala
		Pengukur	
1	2	3	4
	sesuai dengan kebutuhan dasar perbaikan rumah, seperti atap, dinding, lantai, dan fasilitas pendukung lainnya. 3. Nilai gotong royong tercermin dari partisipasi aktif masyarakat dalam membantu proses pembangunan rumah, termasuk keterlibatan langsung penerima bantuan di setiap tahapan		
	kegiatan. 4. Pemenuhan syarat administrasi termasuk bukti kepemilikan lahan minimal 10 tahun, status kependudukan, dan dokumen legalitas sesuai kriteria penerima BSPS.		
	5. Pemahaman masyarakat terhadap program BSPS bersifat stimulan, bukan bantuan penuh, sehingga menuntut partisipasi melalui swadaya dan keterlibatan aktif dalam kelompok penerima bantuan.		
	6. Dorongan keluarga untuk keluar dari kemiskinan Absolut dengan meningkatkan kualitas hunian demi kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai standar.		
Process (Proeses)	Kejelasan informasi tahap awal program mengenai konsep dan mekanisme BSPS, mencerminkan aspek komunikasi.	Likert	Ordinal
	2. Efektivitas peran fasilitator dalam bimbingan teknis konstruksi, pengelolaan dana, dan pemberdayaan sosial, sebagai implementasi aspek sumber daya program.		
	3. Penerima bantuan aktif terlibat dalam pembangunan rumah, ikut mengambil keputusan teknis, dan menerapkan prinsip swadaya serta gotong royong secara langsung.		

Variabel	Indikator	Satuan Pengukur	Skala
1	2	3	4
	4. Ketepatan waktu dalam menjalankan delapan tahapan program BSPS sesuai SE Dirjen Perumahan No.14/2022, mencerminkan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan.		
	5. Penerapan standar rumah layak huni sesuai standar SDGs yang meliputi (ketahanan bangunan, luas 7,2m²/kapita atau tipe 36, ventilasi alami min. 5%, pencahayaan alami min. 10%, serta akses air bersih dan sanitasi layak).		
	6. Sistem monitoring dijalankan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat guna memastikan dana digunakan sesuai peruntukannya.		
	7. Sinergi antara penerima bantuan (KPB), pendamping (TFL), dan instansi pemerintah dalam mengatasi kendala teknis dan administratif program.		
Outcome (Hasil)	1. Penurunan biaya pemeliharaan rumah, mencerminkan efektivitas intervensi pemerintah dalam teori Keynesian untuk meningkatkan kesejahteraan MBR.	Likert	Ordinal
	2. Kondisi hunian yang lebih nyaman, bersih, dan sehat berdampak langsung pada kualitas hidup serta produktivitas anggota keluarga.		
	3. Rumah yang telah diperbaiki mengalami peningkatan nilai aset yang signifikan, mendukung kestabilan ekonomi dan status sosial keluarga		
	4. Rumah dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi produktif seperti usaha rumahan, yang memperluas sumber pendapatan dan meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga.		
	5. Dana rumah tangga yang sebelumnya digunakan untuk perbaikan rumah kini		

Variabel	Indikator	Satuan Pengukur	Skala
1	2	3	4
6	dapat dialihkan ke pendidikan, kesehatan, dan usaha, mendukung transformasi ekonomi keluarga. Kepemilikan rumah layak meningkatkan ketahanan ekonomi dan mendorong kemandirian keluarga dari ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.		

3.4 Populasi dan Sampel

a. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan untuk memilih sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, guna mencapai tujuan penelitian dengan lebih tepat (Hikmawati et al., 2017).

Dalam penelitian ini, karakteristik responden yang dipilih adalah penerima bantuan dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang tinggal di Kecamatan Kota Bandar Lampung, dan yang telah memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan kualitas hunian mereka.

b. Populasi

Populasi merupakan kumpulan individu atau objek dengan karakteristik dan jumlah tertentu yang menjadi subjek penelitian untuk dianalisis serta dijadikan dasar dalam menarik Kesimpulan (Hikmawati et al., 2017). Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah penerima manfaat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Kota Bandar Lampung, yang telah memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan kualitas hunian. Berdasarkan data yang telah diuraikan pada latar belakang, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Bandar Lampung mencapai 1.115 unit, tersebar di berbagai kecamatan. Populasi ini

dipilih untuk menganalisis efektivitas program BSPS dalam memperbaiki kondisi hunian di wilayah penelitian. Berikut adalah data jumlah alokasi penerima bantuan program BSPS pada tahun 2023 :

Tabel 4. Populasi Alokasi Penerima Bantuan BSPS di Kota Bandar Lampung Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Alokasi
1.	Bumi Waras	32
2.	Enggal	3
3.	Kemiling	93
4.	Panjang	7
5.	Teluk Betung Barat	71
Total	5	206

Sumber: SNVT Penyedia Perumahan, 2023

c. Sampel

Sampel adalah bagian yang diambil dari populasi. Keberadaan sampel tidak mungkin terwujud tanpa adanya populasi (Hikmawati et al., 2017). Untuk menghitung besar sampel yang digunakan, penelitian ini menggunakan rumus perhitungan slovin. Penggunaan rumus ini digunakan karena jumlah populasi cukup besar sehingga dibutuhkan pengurangan sebagian dari jumlah seluruh populasi, dengan syarat jumlah sampel ini dapat mewakili seluruh populasi asli. Rumus dan hasil perhitungan slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

Keterangan:

n = Besar sampel

N = Besar populasi

d = Penyimpangan terhadap populasiatau derajat ketepatan yang diinginkan (penelitian ini menggunakan 10%)

Jumlah populasi asli yaitu jumlah penerima BSPS di Kota Bandar Lampung tahun 2020 sebanyak 206 penerima bantuan. Maka hasil perhitungan penelitian ini yaitu:

$$n = \frac{206}{1 + 206(0,1)^2}$$
$$n = 67$$

Hasil dari perhitungan menggunakan rumus slovin di atas, bahwa jumlah responden yang dibutuhkan adalah 67 responden. Sehingga jumlah sampel dari populasi Penerima Bantuan di Beberapa kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

Tabel 5. Sampel Penerima Bantuan BSPS Berdasarkan Desa/Kelurahan di Kota Bandar Lampung Tahun 2023

No	Kecamatan		Desa/	Po	pulasi		Rumus	Sampel
			Kelurahan					
1	2		3		4		5	6
1.	Bumi Waras	a.	Bumi Waras	a.	4	a.	$n = \frac{4}{1 + 206(0,1)^2}$	10
		b.	Kangkung	b.	9		= 1	
		c.	Sukaraja	c.	19	b.	$n = \frac{9}{1 + 206(0,1)^2}$	
						C	$n = \frac{19}{1 + 206(0,1)^2}$	
						C.	` ` ` `	
							= 6	
2.	Enggal	a.	Pahoman	a.	3	1.	n =	1
							$\frac{3}{1+206(0,1)^2} = 1$	
3.	Kemiling	a.	Berimgin	a.	13	a.	$n = \frac{13}{1 + 206(0,1)^2}$	31
			Jaya	b.	9		= 4	
		b.	Kedaung	c.	22	h		
		c.	Sumber Rejo	d.	16	υ.	$n = \frac{9}{1 + 206(0,1)^2}$	
		d.	Sumber Rejo	e.	33		= 3	
			Sejahtera			c.	$n = \frac{22}{1 + 206(0,1)^2}$	
		e.	Sumber				= 8	
			Agung			d.	$n = \frac{16}{1 + 206(0,1)^2}$	
							= 5	
						e.	$n = \frac{33}{1 + 206(0,1)^2}$	
							= 11	
4.	Panjang	Sre	engsem	a.	7	a.	$n = \frac{7}{1 + 206(0,1)^2}$	2
							= 2	

No	Kecamatan	Desa/	Populasi	Rumus	Sampel
		Kelurahan			
1	2	3	4	5	6
5.	Teluk Betung	a. Bakung	A. 21	a. $n = \frac{21}{1 + 206(0,1)^2}$	23
	Barat	b. Batu Putu	B. 50	= 7	
				b. $n = \frac{50}{1 + 206(0,1)^2}$	
				= 16	
Total	5	12	206		67

Sumber: SNVT Penyedia Perumahan, 2023

3.5 Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan atau lokasi penelitian di sejumlah kecamatan di Kota Bandar Lampung sebelum pengisian kuesioner oleh responden. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti kondisi hunian tidak layak huni di kecamatan-kecamatan tersebut (Sugiyono, 2011).

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dalam bentuk komunikasi langsung yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dengan saling bertatap muka. Proses ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka secara langsung kepada responden (Sugiyono, 2011), guna memperoleh informasi atau keterangan yang relevan dengan efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Bandar Lampung.

c. Kuesioner

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer seperti latar belakang responden, pendapat masyarakat tentang efektivitas program BSPS, dan tingkat keberhasilan program tersebut. Kuesioner ini ditujukan kepada masyarakat yang tinggal di kecamatan-kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan program BSPS di Kota Bandar Lampung (Sugiyono, 2011).

3.6 Teknik Pengolahan Data

Dalam pendekatan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner umumnya berupa indikasi atau gejala yang relevan dengan fokus kajian yang diteliti. Penelitian ini menerapkan sejumlah teknik dalam pengolahan data, yang secara rinci akan diuraikan pada bagian berikutnya (Duarsa et al., 2021):

A. Editing

Editing merupakan proses awal dalam pengolahan data yang bertujuan untuk meneliti dan memeriksa kembali data yang telah diperoleh dari lapangan. Pemeriksaan ini difokuskan pada kelengkapan jawaban, kejelasan tulisan, ketepatan makna, serta relevansinya terhadap data lain yang sejenis, guna memastikan validitas dan kelayakan data untuk dianalisis lebih lanjut.

B. Koding

Koding atau pengkodean adalah proses pemberian simbol atau tanda berupa angka terhadap jawaban responden yang telah dikumpulkan. Tujuannya untuk mengubah data kualitatif (berupa teks atau huruf) menjadi data kuantitatif (angka) sehingga memudahkan dalam proses pengelompokan, penghitungan, dan analisis statistik.

C. Tabulating

Tabulasi merupakan tahapan lanjutan setelah proses editing dan coding selesai dilakukan. Pada tahap ini, data yang telah dikodekan akan diproses dan disusun dalam bentuk tabel atau daftar tertentu agar dapat disajikan secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis data dan penarikan kesimpulan .

3.7 Analisis Data

Analisis deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menjabarkan temuan-temuan penelitian dengan cara menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan secara sistematis. Proses ini melibatkan tahapan penyajian data yang telah diperoleh, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan simpulan yang sesuai dengan fokus penelitian. Tahapan-tahapan dalam analisis deskriptif pada penelitian kualitatif dijelaskan sebagai berikut:

34

1. Penyajian Data

Pada tahap ini, data yang telah diolah dianalisis secara komprehensif dengan pendekatan verbal dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan temuan penelitian secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan dapat memberikan gambaran yang jelas terkait fenomena yang diteliti (Widodo et al., 2023).

2. Skala Likert

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada beberapa responden (sampel penelitian) menggunakan metode skala. Setiap indikator pertanyaan dalam kuesioner menggunakan skala Likert. Setiap pertanyaan terdiri dari 5 (lima) kategori jawaban, yaitu:

- a. Sangat Setuju (SS): 5
- b. Setuju (S): Skor 4
- c. Cukup Setuju (CS): Skor 3
- d. Tidak Setuju (TS): Skor 2
- e. Sangat Tidak Setuju (STS): Skor 1

Skala ini dipilih karena memberikan peluang kepada responden untuk mengekspresikan pendapat mereka dalam bentuk persetujuan terhadap suatu pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan peneliti (Sinaga, 2022):

1. Pertanyaan untuk kesesuaian

- a. Sangat sesuai skor: 5
- b. Sesuai skor: 4
- c. Cukup sesuai skor: 3
- d. Tidak sesuai skor: 2
- e. Sangat tidak sesuai skor: 1

2. Pertanyaan tentang kepuasan

- a. Sangat puas skor: 5
- b. Puas skor: 4
- c. Cukup puas skor: 3
- d. Tidak puas skor: 2

e. Sangat tidak puas skor: 1

3. Pertanyaan tentang kesetujuan

a. Sangat setuju skor: 5

b. Setuju skor: 4

c. Cukup setuju skor: 3

d. Tidak setuju skor: 2

e. Sangat tidak setuju skor: 1

4. Pertanyaan tentang kemudahan

a. Sangat mudah skor: 5

b. Mudah skor: 4

c. Cukup mudah skor: 3

d. Tidak mudah skor: 2

e. Sangat tidak mudah skor: 1

3. Kriteria Presentase Capaian

Langkah Selanjutnya adalah mencari rata-rata dari setiap jawaban responden untuk memudahkan penilaian, maka interval sebesar 5. Rumus yang digunakan menurut Ridwan (2010) adalah sebagai berikut:

$$P = rac{Rentang\ Nilai}{Banyaknya\ Kelas\ Interval}$$

Keterangan:

Rentang Nilai: Nilai Tertinggi – Nilai Terendah

Banyak Kelas Interval: 5

Berdasarkan rumus diatas, maka kita dapat menghitung panjang kelas interval sebagai berikut:

$$P = \frac{5-1}{5}$$
$$= 0.8$$

Setelah menghitung interval dari kriteria penilaian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. 4,20 - 5,00: Sangat Efektif (SE)

2. 3,40-4,19: Efektif (E)

3. 2,60 - 3,39: Cukup Efektif (CE)

4. 1,80 - 2,59: Kurang Efektif (KE)

5. 1,00 - 1,79: Tidak Efektif (TE)

Pengelompokkan range interval diatas diasumsikan untuk memberikan keterangan hasil dari interval capaian program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di kota Bandar Lampung. Untuk menjawab angket, penulis menggunakan kategori penilaian sebagai berikut:

Tabel 6. Bentuk Skor Pada Penelitian

Kode	Skor	Keterangan	Presentase (%)	
SS	5	Sangat Setuju	80,1 - 100	
S	4	Setuju	60,1 - 80	
CS	3	Cukup Setuju	40,1 - 60	
TS	2	Tidak Setuju	20,1 - 40	
STS	1	Sangat Tidak Setuju	0 - 20	

Sumber: Metodologi Penelitian, 2022

Untuk menghitung rata-rata efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam meningkatkan kualitas hunian di Kecamatan Bandar Lampung, digunakan rumus berikut:

$$Mx = \frac{\sum x}{N}$$

Keterangan:

Mx = Mean/Rata-rata

X = Jumlah Variabel x

N = Jumlah kasus

Kategori efektivitas mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/25/M.PAN/2/2004, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 7. Kategori Efektifitas

No	Rasio Efektivitas	Keterangan
1.	>79,99	Sangat efektif
2.	60 - 79,99	Cukup Efektif
3.	40 - 59,99	Kurang efektif
4.	< 40	Tidak efektif

Sumber : Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.Kep/25/M.PAN/2/2004

Pengelompokkan presentase diatas diasumsikan untuk memberikan keterangan hasil dari presentase capaian efektivitas program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

4. Tabel Rancangan Analisis Deskriptif

Dibawah ini merupakan tabel rancangan analisis deskriptif kuantitatif yang akan di terapkan oleh peneliti untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang di implementasikan di kota Bandar Lampung.

Tabel 8. Rancangan Analiisis deskriptif Kuantitatif Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Bandar Lampung

Variabel			Tanggapan Responden								
				eril			Total	Mean	Skor ideal	Presentase Capaian (%)	Keterangan
		1	2	3	4	5					
Input	Frek										
	%								5	100	
	Skor								-		
Procces	Frek										
	%								5	100	
	Skor								_		
Outcome	Frek										
	%								5	100	
	Skor								-		

Rata-	5	100	
rata			

5. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam pengolahan data adalah menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan. Kesimpulan ini dirumuskan secara objektif dengan mempertimbangkan keseluruhan temuan penelitian, sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian secara akurat. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa data kualitatif yang kemudian dikonversi menjadi data kuantitatif agar lebih mudah dianalisis secara statistik.

3.7 Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Dalam buku Metodologi Penelitian yang ditulis oleh (Mulyani et al., 2021) validitas berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi item dalam serangkaian pertanyaan. Suatu instrumen dianggap valid jika item-itemnya secara efektif. Uji validitas bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana instrumen pertanyaan dapat mengukur efektivitas pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kota Bandar Lampung. Pengukuran validitas dilakukan melalui analisis Korelasi Product Moment dengan menggunakan rumus yang tercantum sebagai berikut:

$$r = \frac{n.\sum x. y - \sum x. y}{\sqrt{\{N\sum x^2\}\{\sum x. y^2 - (\sum y)\}}}$$

Keterangan:

r = Korelasi

N = Jumlah Populasi

 \sum = Jumlah total

x = nomor pertanyaan

y = total skor

Sumber: Sugiyono (2011)

39

Pengujian kevalidan menggunakan r product moment pada derajat kebebasan (dk)

= n - 2 dengan kriteria pengujian:

Jika rhitung > rtabel, maka daftar pertanyaan dinyatakan valid.

Jika rhitung < rtabel, maka daftar pertanyaan dinyatakan tidak valid

b. Uji Reliabilitas

Dikutip dari buku yang ditulis oleh Reliabilitas merujuk pada seperangkat

pengukuran atau alat ukur yang menuukkan tingkat konsistensi apabila digunakan

secara berulang dalam proses pengukuran. Dengan kata lain, reliabilitas tes

mencerminkan tingkat kestabilan atau keajegan suatu instrumen, yaitu sejauh mana

tes tersebut dapat diandalkan untuk menghasilkan skor yang tetap stabil, meskipun

diterapkan dalam berbagai kondisi atau waktu yang berbeda.

Menurut Arikunto (2010) pengujian reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi

suatu instrumen dalam mengukur variabel yang diteliti. Metode yang digunakan

dalam pengujian ini adalah Cronbach's Alpha (α). Suatu instrumen dinyatakan

memiliki reliabilitas yang dapat diterima apabila nilai Cronbach's Alpha (α) yang

diperoleh mencapai > 0,60.

$$ri = \frac{K}{K - 1} \left\{ 1 - \frac{\sum pq}{S^2} \right\}$$

Keterangan:

K: Jumlah item dalam instrumen

Pi : proporsi banyaknya subjek yang menjawab pada item 1

qi : 1 - pi

 S^2 : varians total

Sumber: Sugiyono (2011)

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada Bab IV mengenai efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas program berada pada kategori cukup efektif, namun belum mencapai optimalitas penuh, terutama pada aspek input dan outcome. Berikut ringkasan kesimpulan berdasarkan tiga dimensi utama efektivitas:

1. Efektivitas Variabel Input

Tingkat kesiapan awal masyarakat penerima bantuan tergolong kurang efektif, dengan rata-rata capaian hanya sebesar 57,60%. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum program dilaksanakan, masyarakat belum memiliki kapasitas teknis, pemahaman mendalam, maupun kesiapan finansial yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program secara mandiri. Beberapa indikator seperti kecukupan bantuan material, pemahaman terhadap program, dan semangat gotong royong juga masih rendah. Temuan ini menandakan bahwa redistribusi bantuan belum berjalan optimal, karena kelompok sasaran masih menghadapi hambatan akses terhadap kebutuhan dasar perumahan yang layak.

2. Efektivitas Variabel Proses

Selama tahapan pelaksanaan, program BSPS menunjukkan capaian yang lebih baik dengan rata-rata efektivitas 66,47%, berada pada kategori cukup efektif. Indikator dengan capaian tertinggi adalah peran fasilitator lapangan (75,52%), yang menunjukkan keberhasilan dari sisi pendampingan teknis dan administratif. Namun demikian, kendala tetap ditemukan, seperti pada ketepatan waktu pelaksanaan (58,20%) dan transparansi penggunaan dana (60,00%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses program mulai

menunjukkan arah yang benar, namun prinsip Minimization of Excess Burden menurut Tresch belum sepenuhnya tercapai, karena masih terdapat beban administratif dan teknis yang dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam keterlambatan dan kurangnya informasi.

3. Efektivitas Variabel Outcome

Dampak akhir program memiliki capaian rata-rata sebesar 61,68%, termasuk dalam kategori cukup efektif. Beberapa indikator seperti penurunan biaya perawatan rumah (65,07%) dan ketahanan ekonomi keluarga (78,50%) menunjukkan hasil yang cukup positif. Namun demikian, indikator penting lain seperti kenyamanan dan kesehatan hunian (55,82%), pemanfaatan rumah untuk kegiatan ekonomi (57,61%), dan pengalihan dana ke kebutuhan strategis (56,11%) masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Incentive Compatibility dari program belum optimal, karena masih sedikit penerima bantuan yang mampu mengubah perbaikan rumah menjadi alat pemberdayaan ekonomi jangka panjang.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, berikut disampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada pembuat kebijakan Program BSPS maupun peneliti selanjutnya:

1. Saran bagi Pembuat Kebijakan (Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, dan Tim Teknis BSPS):

a. Peningkatan Kecukupan Bantuan Material dan Upah Tukang

Ditemukan bahwa sebagian besar penerima bantuan merasa nilai bantuan belum mencukupi untuk memperbaiki rumah secara utuh, khususnya pada kasus kerusakan berat. Oleh karena itu, alokasi bantuan perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan bangunan dan harga material lokal agar lebih proporsional dan adil.

b. Penguatan Tahap Persiapan Penerima Program (Input)

Pemerintah perlu memberikan edukasi teknis dan sosialisasi program yang lebih komprehensif sebelum bantuan diberikan. Hal ini bertujuan agar

masyarakat lebih siap secara mental, finansial, dan sosial dalam menjalankan program yang berbasis swadaya.

c. Pendampingan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi

Selama ini pendampingan lebih fokus pada aspek teknis perbaikan rumah. Ke depan, fasilitator BSPS sebaiknya juga dilatih untuk mendorong dan membimbing penerima bantuan agar memanfaatkan rumah layak huni sebagai basis aktivitas produktif (misalnya membuka usaha kecil, warung, dll), agar rumah tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga menjadi alat untuk keluar dari kemiskinan.

d. Pemantauan Dampak Jangka Panjang (Outcome)

Pemerintah sebaiknya menetapkan sistem monitoring jangka panjang (1–3 tahun pasca program) untuk menilai apakah perbaikan rumah telah berdampak pada kesejahteraan dan kemandirian ekonomi keluarga. Hal ini penting agar subsidi perumahan tidak hanya bersifat jangka pendek.

e. Keterlibatan Pemerintah Daerah dan Komunitas

Untuk memperkuat basis gotong royong dan pelibatan sosial, pemerintah daerah perlu didorong agar lebih aktif dalam proses pelaksanaan program, termasuk memfasilitasi sumber daya tambahan (swadaya lokal) dan menghubungkan dengan program pengentasan kemiskinan lainnya.

2. Saran bagi Penelitian Selanjutnya:

a. Fokus pada Efektivitas Jangka Panjang dan Produktivitas Ekonomi

Penelitian ini menemukan bahwa indikator terkait produktivitas penerima bantuan pasca program belum menunjukkan hasil optimal. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian ke depan lebih fokus pada hubungan antara perbaikan rumah dan peningkatan produktivitas keluarga, seperti pendapatan tambahan, pembukaan usaha rumahan, atau efisiensi pengeluaran rumah tangga.

b. Penambahan Variabel Pemberdayaan Sosial

Peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan instrumen dengan menambahkan variabel seperti motivasi masyarakat, dukungan komunitas, atau akses terhadap pelatihan keterampilan pasca perbaikan rumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, D. N., Huda, S., & Fitria, A. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Program Bsps Melalui Upaya Keswadayaan Demi Mewujudkan Rumah Layak Huni di Desa Pucangombo. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, *5*(2), 791–803. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.610
- Amalya, H. A., & Latief, R. (2023). *Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kec . Tamalanrea Kota Makassar.* 69–88.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. Rineka Cipta.
- Asadullah, M. N., & Savoia, A. (2018). Poverty reduction during 1990–2013: Did millennium development goals adoption and state capacity matter? *World Development*, 105, 70–82. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.12.010
- B, I., & Sadriah, S. (2020). Pengaruh Efektivitas Program Bantuan Srimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene). 2(2), 103–116.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kependudukan dan Migrasi*. Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2023). Kependudukan dan Migrasi. %0ABandarlampungkota.Bps.Go.Id/. %0Ahttps://bandarlampungkota.bps.go.id/id/statistics-table?subject=519
- Barika, B., Ekaputri, R. A., & Hermanto, B. A. (2024). Determinan Kemiskinan Di Sumatera. *Jurnal Ekonomi-Qu*, *13*(1), 68. https://doi.org/10.35448/jequ. v13i1.20532
- Cai, J. (2022). Housing Assistance , Poverty , and Material Hardships. *Housing Policy Debate*, $\theta(0)$, 1–17. https://doi.org/10.1080/10511482.2022.2141581
- Desyra, T. E., Dengo, S., & Londa, V. Y. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(110), 35–45. https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index .php/JAP/article/view/36273

- Duarsa, S. B. A., Arjita, D. P. I., Ma'ruf, F., Mardiah, A., Hanafi, F., Budiarto, J., & Utami, S. (2021). *Buku Ajar Penelitian Kesehatan* (1st ed.). PSPD FK UNIZAR. https://repository.unizar.ac.id/id/eprint/96/1/B.8.1_Buku Ajar Penelitian Kesehatan.pdf
- Eriksen, D. M., Kwon, E., & Yang, G. (2023). The Effect of Targeted Subsidies on Poverty Exposure of Housing Voucher Recipients: Evidence from the Small-Area Fair Market Rents.
- Fatimahtuzzahro. (2022). Modul Perkuliahan Ekonomi Pembangunan (p. 71).
- Gilbert, A. G. (2014). Free housing for the poor: An effective way to address poverty? *Habitat International*, 41(January 2014), 253–261. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2013.08.009
- Hikmawati, & Fenti. (2017). *Metodologi Penelitian* (1st ed.). PT Rajagrafindo Persada. www.rajagrafindo.co.id
- Ihwan, M., Fadillah, C., Hidayah, S. N., & Sumardiana, B. (2022). Pemenuhan Hak Atas Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, *5*(1), 89–101. https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.50011
- Indrianingrum, L. (2016). Rencana Kepemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus Kelurahan Tanjungmas Kota Semarang). *Jurnal Teknik Sipil Dan Perencanaan*, 18(1), 15–20. https://doi.org/10.15294/jtsp.v18i1.6690
- Januarsyah, R. H. (2024). Peran Inklusi Keuangan terhadap Pencapaian Target Presentase Penduduk Miskin dalam RPJMN 2024: Studi Kasus di Indonesia. 3(1), 51–63.
- Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. (2018). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stiumlan Perumahan Swadaya*. 3(2), 91–102. https://peraturan.bpk.go.id
- Kementerian PUPR. (2022). Kurangi Backlog Hunian Layak, Kementerian PUPR Siapkan Grand Design Perumahan Segmen MBR Informal. *Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat*, 1–3.
- Khairunnisa, & Nasruddin. (2019). The Role Of BSPS To Economic And Social Assistance Recipients in Simpang Empat District. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(3), 742–759.
- Kim, S., Hwang, J., & Lee, M. (2022). Effect of Housing Support Programs on Residential Satisfaction and the Housing Cost Burden: Analysis of the Effect of Housing Support Programs in Korea Based on Household Attributes.

- Kuncoro, M. (2009). Ekonomika Indonesia: dinamika lingkungan bisnis di tengah krisis global. UPP STIM YKPN. https://books.google.co.id
- Maharani, A. S. ayu, & Alexander, H. b. (2024). 32,34 Juta Rumah Tangga Indonesia Punya Masalah Perumahan. *Kompas.Com*, 1.
- Maiqfirlana, A., Huda, S., & Utami, F. A. (2023). Dampak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penerima Bantuan (Studi Kasus Ds. Padi Kec. Tulakan Kab. Pacitan). 5(2), 84–94.
- Mulyani, & Rochani, S. (2021). *Metodologi Penelitian* (A. Jejen (ed.); 1st ed.). Widina Bhakti Persada Bandung. www.penerbitwidina.com
- Mundok, Z., Rotinsulu, T. O., & Masloman, I. (2022). Pengaruh Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (Rtlh) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah* ..., 22(3), 13–26.
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. McGraw-Hill. https://books.google.co.id
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill Book Company. https://books.google.co.id/
- Nahdah, A. A., Marseto, & Oktafia, R. (2023). Dampak Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Watuagung. 9(November), 64–75.
- Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pub. L. No. 04, 30 (2017).
- Perdamaian, L. G., & Zhai, Z. (2024). Status of Livability in Indonesian Affordable Housing. *Architecture*, 4(2), 281–302.
- Puspitasari, P., Syamsul, H., & Utami, F. A. (2023). *Implementasi Program BSPS Sebagai Penanganan Kemiskinan Ekstrem Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kemuning.* 9(20), 639–650.
- Putri, A. N. A. (2024). *Alarm Tanda Bahaya: Kelas Menengah Turun Kasta, Kesejahteraan Sirna*. Kime FEB Unnes. https://sites.unnes.ac.id/kimefe/2024/11/alarm-tanda-bahaya-kelas-menengah-turun-kasta-kesejahteraan-sirna/
- Qomaria, A. (2015). Kebijakan dan Manajemen Publik Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(April), 1–7.

- Rahman, A., Sari, W. M. N., Irwanto, Nugroho, P. A., Indriana, Ladjin, N., Haryanto, E., Amane, O. P. A., Ahmadin, & Alslan, A. (2022). Metode Penelitian Ilmu Sosial. In *Widina Bhakti Persada Bandung* (Issue 10).
- Rahmawati, A., Lubis, D. S., & Damisa, A. (2024). Determinasi Kemiskinan di Sumatera Analisis Empiris Terhadap Faktor Demografi, Kesehatan, Pendidikan, IPM, dan PDRB (2019–2023). 03(02), 1–17.
- Robiansyah, I., Suryapermana, N., & Sudrajat, B. (2022). Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang (Studi di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang). *Tsarwah*, 7(1), 12–19. https://doi.org/10.32678/tsarwah.v7i1.6567
- Sinaga, D. (2022). Buku Ajar Metodologi Penelitian. UKI Press, 1–90.
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). *Economics of the Public Sector*. W. W. Norton, Incorporated. https://books.google.co.id
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta*, *Bandung*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Economic Development*. Pearson Addison Wesley. https://books.google.co.id
- Tresch, R. W. (2002). *Public Finance: A Normative Theory*. Elsevier Science. https://books.google.co.id
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, 53 1 (2011). http://peraturan.bpk.go.id/ Details/39128/uu-no-1-tahun-2011
- Viyulia, Arenawati, & Agus Sjafari. (2023). Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Niara*, 16(1), 1–13. https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.12707
- Wayne K. Hoy, & C. G. M. (2008). Educational Administration: Theory, Research, and Practice, 6th. In *Journal of Educational Administration* (Vol. 46, Issue 1).
- Widodo, S., Ladyani, F., Asrianto, L. O., Rusdi, Khairunnisa, Lestari, S. M. P., Wijayanti, D. R., Devriany, A., Hidayat, A., Dalfian, Nurcahyati, S., Sjahriani, T., Armi, Widya, N., & Rogayah. (2023). Metodologi Penelitian. In *Cv Science Techno Direct*.

- Wijayanto, A. T. (2021). Hubungan Kondisi Rumah Tidak Layak Huni Dan Status Kemiskinan Rumah Tangga Di Provinsi Sulawesi Utara. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi).*, 8(3), 668–680. https://doi.org/10.35794/jmbi.v8i3.35883
- Zahira, S. N., & Dariah, A. R. (2024). Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan di Kabupaten Majalengka. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 4(1), 9–18.